

Pengaruh Zakat dan DOK Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi

Nopijal Rizki Rahman ^a, Surya Darma ^{b*}, Khairul Amri ^c

^{a,b*,c} Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Zakat and DOKA on poverty levels using Economic Growth as a moderating variable. Operationalizing panel data from two administrative regions (districts and cities) in Aceh during the 2019-2021 period, the analysis models used are multiple regression and moderated regression analysis. The research results show that Zakat and DOKA in that year had no effect in reducing poverty in Aceh. However, increasing GRDP moderates the influence of Zakat and DOKA on poverty, making these two instruments more effective in reducing poverty levels and increasing economic prosperity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Zakat dan DOKA terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Mengoperasionalkan data panel dari dua wilayah administratif (kabupaten dan kota) di Aceh selama periode 2019-2021, model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis regresi moderat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat dan DOKA pada tahun tersebut tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Aceh. Namun, peningkatan PDRB memoderasi pengaruh Zakat dan DOKA terhadap kemiskinan, sehingga kedua instrumen ini lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

ARTICLE HISTORY

Received 17 March 2024

Accepted 20 April 2024

Published 30 May 2024

KEYWORDS

Economic growth; Distribution of Zakat; Special Autonomy Fund; Moderated Regression Analysis.

KATA KUNCI

Pertumbuhan Ekonomi; Penyaluran Zakat; Dana Otonomi Khusus; Moderated Regression Analysis.

1. Pendahuluan

Kemiskinan selalu menjadi masalah yang memprihatinkan bagi sebagian besar negara karena fenomena yang kompleks dan komprehensif serta mencakup banyak dimensi perilaku manusia dan sosial (Siwar *et al*, 2016; Alam, 2017). Purwanto (2007) mengatakan kesadaran Pemerintah Indonesia dampak yang akan ditimbulkan oleh kemiskinan telah menjadikan isu kemiskinan menjadi fokus utama pemerintah sejak orde baru. Aceh menjadi salah satu provinsi yang terus menjadi perhatian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Aceh telah menjadi provinsi termiskin sejak 2002, pada tahun yang sama BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh berjumlah 1,10 juta jiwa atau 29,83 persen. Persentase tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera seperti Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pemerintah terus berupaya melakukan program sosial kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan seperti dana desa, dana otonomi khusus dan bantuan sosial lainnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha mikro rumahan.

Aceh menjadi salah satu Provinsi yang diberikan hak serta kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dana otonomi khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Pasal 183 ayat 1. Total DOKA yang diterima Aceh sebesar 100 Triliun rupiah dalam jangka 20 tahun (2008-2027), diambil dari 2% Dana Alokasi Umum Nasional untuk 15 tahun pertama dan 1% dari Dana Alokasi Umum Nasional pada 5 tahun berikutnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan dokumen APBA secara keseluruhan selama kurun waktu 15 tahun, Aceh sudah menerima Dana Otonomi Khusus atau selanjutnya disebut DOKA dari pemerintah pusat sebesar Rp. 95,93 triliun rupiah. Pemerintah Aceh juga turut mengupayakan pemberantasan kemiskinan melalui pengoptimalisasi sumber pendanaan diantaranya dari Zakat. Pembentukan BaitulMal sebagai lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat agar membantu para masyarakat yang kurang mampu demi menciptakan kestabilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan harian, dana zakat juga digunakan sebagai modal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang pada Tahun 2022 berdasarkan Dinas Koperasi dan UMKM di Aceh mencapai 74.810 UMKM.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erdian dan Ahmad (2013) setelah diberlakukannya otonomi khusus di Aceh terjadi penurunan persebaran dan kondisi kemiskinan di setiap Kabupaten sehingga dana otonomi khusus berdampak positif pada penurunan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Murniati dan Beik (2014) Zakat berperan positif dan signifikan menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan pembangunan mustahik. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait "Pengaruh Zakat dan Dana Otonomi Khusus Aceh terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi.

1.1 Keterkaitan antara penyaluran zakat dan kemiskinan

Zakat menjadi salah satu pilar penting di dalam agama Islam serta menjadi media pendistribusian harta kepada yang kurang mampu dengan harapan dapat memberdayakan ekonomi untuk keluar dari jerat kemiskinan (Firmansyah, 2013; Wibowo, 2015; Suryani dan Fitriani, 2022). Studi empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki korelasi dalam perbedayaan ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Husna *et al* (2018); Hani'in (2018) menunjukkan zakat efektif dalam meingkatkan kesejahteraan mustahik, sejalan dengan penelitian tersebut Dwi (2013); Pratama (2015) dan Suratno (2017) zakat produktif berpengaruh dalam menuntaskan kemiskinan. Meskipun zakat memiliki potensi yang besar dalam mengurangi kemiskinan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaannya diantaranya pertama seperti yang disampaikan oleh Atmaja (2021); Aswad dan Ardi (2021) pernah terjadi kasus salah

urus dana zakat yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sehingga masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara pribadi. Kedua kurangnya koordinasi antar lembaga zakat menyebabkan duplikasi dan ketidakefisienan dalam distribusi dana zakat (Maguni, 2013; Afriadi dan Sanrego 2016; Haidir, 2019; Luntajo dan Hasan, 2023). Dan ketiga dinamika regulasi dan kebijakan yang ketat dalam pengelolaan zakat (Ridwan, 2016; Cayani, 2023).

1.2 Keterkaitan antara DOK dan kemiskinan

Dana Otonomi Khusus atau disingkat DOK merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otsus suatu daerah (Purnamadewi, 2018) yang diberikan untuk Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Dana otonomi khusus merupakan salah satu hasil dari desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan orang miskin, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Bank Dunia (2020) dalam laporannya menjelaskan keberhasilan DOK sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana. Sejalan dengan pernyataan diatas hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliadi dan Amri (2019) menunjukkan DOK memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan di Aceh. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Pramusinto *et al* (2018) meskipun DOK meningkatkan investasi infrastruktur dan layanan publik di Papua dan Papua namun dampaknya terhadap penurunan terhadap kemiskinan masih belum signifikan, hal ini dikarenakan terjadi permasalahan dalam pengelolaan seperti korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola dan secara efektif

1.3 Peran moderasi pertumbuhan dalam hubungan antara penyaluran zakat dan DOK dengan tingkat kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi subjek penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di berbagai negara (Purnomo, 2018), penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmadi (2014) dan Nurin (2016) berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus. Sejalan dengan penelitian sebelumnya Fitriani (2020) mengevaluasi bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan antara penyaluran zakat dan DOK dengan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi dapat meningkatkan efektivitas zakat dan DOK dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Metode

Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS dan Baitul Mal kabupaten kota di Aceh. Data tersebut berbentuk panel data yakni gabungan antara data time series selama periode 2019-2023 dengan data silang 23 kabupaten kota di Aceh. Variabel yang dioperasionalkan terdiri dari tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat, dengan DOKA dan penyaluran zakat sebagai variabel bebas. Tingkat kemiskinan diukur dengan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Selanjutnya, DOKA dan realisasi penyaluran zakat masing-masing diukur dengan satuan Rp000 per kapita. Selain itu, juga terdapat PDRB sebagai variabel pemoderasi. PDRB yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah PDRB Per kapita yang diukur dengan satuan Rp Juta per kapita. Dikarenakan data yang dioperasionalkan dalam kajian ini adalah data panel maka model statistik yang diterapkan untuk menganalisis hubungan fungsional antar variabel adalah regresi panel. Selain itu, adanya PDRB sebagai variabel pemoderasi berimplikasi bahwa model regresi panel dimodifikasi dalam bentuk moderated

regression analisis (MRA), yang kemudian proses estimasi dilakukan secara bertahap. Secara statistik, model regresi panel berdasarkan tahapan proses estimasi seperti ditunjukkan dalam Model 1, 2, 3 dan 4.

$$LMSK_{it} = \alpha + \beta_1 LZKT_{it} + \beta_2 LDOKA_{it} \tag{1}$$

$$LMSK_{it} = \alpha + \beta_1 LZKT_{it} + \beta_2 LDOKA_{it} + \beta_3 LPDRB_{it} \tag{2}$$

$$LMSK_{it} = \alpha + \beta_1 LZKT_{it} + \beta_2 LDOKA_{it} + \beta_3 LPDRB_{it} + \lambda_1 LZKT_{it} * LPDRB_{it} \tag{3}$$

$$LMSK_{it} = \alpha + \beta_1 LZKT_{it} + \beta_2 LDOKA_{it} + \beta_3 LPDRB_{it} + \lambda_2 LDOKA_{it} * LPDRB_{it} \tag{4}$$

Keterangan:

- LMSK_{it} : Nilai logaritma tingkat kemiskinan
- LZKT_{it} : Nilai logaritm realisasi penyaluran zakat per kapita.
- LDOKA_{it} : Nilai logaritma Dana Otonomi Khusus per kapita.
- LPDRB_{it} : Nilai logaritm PDRB per kapita
- λ₁LZKT_{it}*LPDRB_{it} : Variabel Moderasi 1
- λ₂LDOKA_{it}*LPDRB_{it} : Vareabel Moderasi 2

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kajian ini menggunakan empat variabel, terdiri dari tingkat kemiskinan, realisasi penyaluran zakat, dana otonomi khusus dan PDRB. Menggunakan data panel 23 kabupaten kota di Aceh selama periode 2019-2023, hasil statistik deskriptif masing-masing variabel tersebut seperti ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Zakat (Rp Ribu per- Kapita)	DOKA (Rp Ribu per- Kapita)	Kemiskinan (persen)	PDRB (Rp Juta per- Kapita)
Rata-rata	33,906	605,105	15,58	32,13
Maksimum	92,111	2.119,864	20,78	78,06
Minimum	5,78	199,541	6,90	19,23

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2024.

Berdasarkan tabel 1 memperlihatkan parameter statistik deskriptif masing-masing variabel dari tahun 2019-2021 sebagai berikut, nilai rata-rata (*mean*) kemiskinan sebesar 15,58 persen, kemudian rata-rata (*mean*) dari penyaluran zakat dan DOKA per-kapita berturut-turut sebesar Rp 33.906 dan Rp 605.105, dan terakhir nilai rata-rata (*mean*) dari PDRB sebesar Rp 32.135.800.

Tabel 2. Hasil estimasi

Constant dan Independen t Variable	Dependent Variabel: MSK							
	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
	Koef. Estimasi _i	p-value	Koef. Estimasi _i	p-value	Koef. Estimasi _i	p-value	Koef. Estimasi _i	p-value
C	2,402 [10,767]	0,00 0	2,014 [7,590]	0,00 0	0,334 [0,239]	0,81 2	0,462 [0,275]	0,78 5
LZKT	0,001 [0,144]	0,88 6	0,003 [0,297]	0,76 8	0,153 [1,254]	0,21 7	0,001 [0,078]	0,93 8

LDOKA	0,023 [1,246]	0,21 9	0,027 [1,529]	0,13 4	0,037 [1,908]	0,06 3	0,146 [1,145]	0,25 8
LPDRB			0,091 [2,347]	0,02 4	0,592 [1,454]	0,15 3	0,533 [1,134]	0,26 3
M1					-0,048 [-1,235]	0,22 4		
M2							-0,033 [-0,942]	0,35 1
R ²	0,9966		0,9969		0,9970		0,9970	
Adj. R ²	0,9947		0,9952		0,9952		0,9952	
F-Stat	538,2626		569,9161		554,7580		546,6066	
P-Value	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	

Secara keseluruhan, kedua model menunjukkan bahwa peningkatan dalam Zakat, DOKA, dan PDRB berhubungan dengan peningkatan tingkat kemiskinan, mengindikasikan bahwa variabel-variabel ini tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan. Hasil analisis ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiastuti (2021), Ramadhani dan Dahliana (2022) yang menjelaskan bahwasannya Baitul Mal Aceh lebih memprioritaskan penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif untuk mencukupi kebutuhan dasar. Padahal jika zakat disalurkan dalam bentuk produktif tentunya meningkatkan produktifitas kerja, menciptakan semangat berwirausaha dan memberdayakan mustahik agar tercapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk menjadi muzakki dikemudian hari serta menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh. Sama halnya dengan DOKA yang selama ini menjadi harapan besar penuntasan kemiskinan di Aceh belum mampu berbicara banyak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mantsani (2019) dan Fahlefi (2023) DOKA tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Hal ini pula tentu tidak terlepas dari cara pengelolaan, penyaluran DOKA seperti tahun 2018, realisasi bidang pengentasan kemiskinan hanya mencapai 13,36% atau hanya terealisasi sebesar Rp61,75 miliar dari Rp462,34 miliar yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih belum optimal dalam mengeksekusi program-program di bidang pengentasan kemiskinan. Selain itu permasalahan dalam pengelolaan DOKA juga ikut serta faktor politis yang terjadi di Provinsi Aceh.

Sementara itu PDRB Aceh pada tahun 2019-2021 juga belum dapat menjadi indikator penurunan kemiskinan di Aceh, seperti yang dijelaskan oleh Miranda (2021) belum adanya keseimbangan dalam meningkatkan PDRB di Provinsi Aceh dapat terjadi karena belum adanya pemerataan pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan pendapatan di suatu wilayah. Penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhykha (2018) PDRB berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi tidak merata dan didominasi oleh kontribusi masyarakat golongan berpendapatan tinggi.

Pada Model 3 dan 4 memperlihatkan interaksi antara PDBR dengan Zakat (PDBR*ZKT) dan PDRB dengan DOKA (PDRB*DOKA) yang sama-sama berpengaruh negatif terhadap kemiskinan ($\lambda_1 = -0,0479$ dan $\lambda_2 = -0,0331$). Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan PDRB memoderasi pengaruh Zakat dan DOKA terhadap kemiskinan. interaksi antara PDRB dan Zakat. Nilai koefisien interaksi (λ_1) adalah -0,0479, yang berarti setiap peningkatan PDRB yang dikombinasikan dengan Zakat akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 4,79%. Ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah dengan PDRB yang lebih tinggi, efektivitas zakat dalam menurunkan

kemiskinan meningkat. Dengan kata lain, ketika ekonomi daerah tumbuh, distribusi zakat menjadi lebih efisien dan mampu menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan, sehingga pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, interaksi antara PDRB dan DOKA juga menunjukkan pola yang sama. Koefisien interaksi (λ_2) adalah $-0,0331$, yang berarti setiap peningkatan PDRB yang dikombinasikan dengan DOKA akan mengurangi kemiskinan. Ini mengindikasikan bahwa daerah dengan PDRB yang lebih tinggi mampu menggunakan DOKA lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Peningkatan PDRB memberikan dukungan ekonomi yang lebih kuat, memungkinkan alokasi dana tersebut digunakan secara optimal untuk program-program yang menargetkan pengentasan kemiskinan.

Kesimpulannya, peningkatan PDRB memoderasi pengaruh Zakat dan DOKA terhadap kemiskinan, membuat kedua instrumen tersebut lebih efektif di wilayah dengan ekonomi yang lebih baik. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial ini sangat penting dalam strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Peningkatan PDRB tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara umum tetapi juga memperkuat upaya sosial dalam membantu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

4. Kesimpulan

Dalam analisis ini, Model 1 dan 2 menunjukkan bahwa Zakat, DOKA, dan PDRB secara individu berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan di Aceh. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam variabel-variabel tersebut tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan secara langsung. Penelitian sebelumnya juga menguatkan temuan ini, menyoroti bahwa penyaluran zakat dan DOKA belum optimal untuk mengatasi kemiskinan, disertai dengan tantangan dalam pengelolaan dan realisasi program di lapangan. Namun demikian, Model 3 dan 4 menunjukkan bahwa interaksi antara PDRB dengan Zakat serta PDRB dengan DOKA memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, efektivitas Zakat dan DOKA dalam mengurangi kemiskinan meningkat secara signifikan. Dengan kata lain, ketika ekonomi daerah membaik, alokasi dana dari Zakat dan DOKA dapat dioptimalkan untuk lebih efektif menjangkau mereka yang membutuhkan, yang pada gilirannya membantu meringankan kemiskinan secara lebih efisien.

Kesimpulannya, strategi pengentasan kemiskinan di Aceh perlu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan sosial seperti distribusi Zakat dan DOKA. Peningkatan PDRB bukan hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat upaya sosial dalam mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Sinergi antara faktor-faktor ini menjadi kunci dalam mengembangkan strategi yang berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.

Referensi

- Alam, K. (2017). Poverty reduction through enabling factors. *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development*, 14(4), 310-321. DOI: <https://doi.org/10.1108/WJSTSD-07-2016-0049>.
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i2.67>.

- Dwi Rakhmawan, R. (2013). *Sistem Informasi Zakat, Infaq & Shodaqoh di Badan Amil Zakat, Infaq & Shodaqoh Jami Iqra* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Fahlefi, M. R. (2023). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Fajar, M. S., & Adab, M. S. I. P. *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi*. Penerbit Adab.
- Hani'in, U. (2018). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen. DOI: <https://doi.org/10.19305/elha.v8i1.4728>.
- Mantsani, M., Rumodar, D. A. L., Syukriah, K., & Soegiarto, S. (2019). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2019, No. 1, pp. 466-477). DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.17>.
- Miranda, N. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Mourny, E. (2013). *PENGARUH OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI ACEH PERIODE TAHUN 2008-2011* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan zakat dan penurunan kemiskinan di Aceh: Peran dana otonomi khusus sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>.
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2014). Pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan mustahik: Studi kasus pendayagunaan BAZNAS kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 135-149.
- Purnamadewi, Y. L. Dampak Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Periode 2010-2016.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 295-324. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.11009>.
- Ramadhani, M., & Dahliana, D. (2022). Dampak Pengangguran dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Ecoplan*, 5(2), 150-158.
- Siwar, C., Ahmed, F., Mohd Idris, N. D., Idrus, S., Abdul Ghan, A. H., & Zahari, S. Z. (2014). Poverty mapping and assessing socio-demographic characteristics of the households: A case study in Pahang, Malaysia. *Journal of Applied Sciences*, 14(20), 2632-2640.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.

Widiastuti, A. S. (2021). Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 80-90. DOI: <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.973>.